

STRATEGI IMPLEMENTASI *SMART CITY* DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KAMPUNG SEJAHTERA DI PROVINSI BENGKULU

Lina Asnamawati¹, Demvi Sara², Ellyunizar³

¹Universitas Terbuka-UPBJJ Bengkulu, Jl. Sadang Lingkar Barat Kota Bengkulu

²Universitas Terbuka-UPBJJ Bogor Jl.KH Soleh Iskandar No.234 Tanah Sereal Bogor

³Balai Penyuluhan Pertanian Kota Bengkulu

Email korespondensi: linaas@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Smart city merupakan kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dengan efisien. *Smart city* membuat kota lebih efisien dan layak huni. Masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, lingkungan hidup. Pengembangan *smart city* dengan menggunakan prinsip-prinsip yaitu *smart government*, *smart economy*, *smart mobility*, *smart people*, *smart living*, *smart live*. Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai persentase masyarakat miskin yang lebih tinggi dari pada kelompok masyarakat miskin lainnya. Kondisi yang sama juga terjadi dalam kehidupan nelayan yang ada di Provinsi Bengkulu. Kawasan pesisir mempunyai potensi yang sangat besar untuk berkembang menjadi kawasan wisata. Awalnya kampung nelayan di Pulau Bai Provinsi Bengkulu merupakan kawasan yang kumuh dikembangkan menjadi kampung sejahtera tempat wisata di Provinsi Bengkulu. Pemberdayaan adalah suatu proses belajar yang ditawarkan kepada masyarakat sasaran, agar dengan berbagai potensi/daya yang mereka miliki, mereka dapat belajar menolong dirinya sendiri, sehingga pada gilirannya akan tercapai kondisi baru lebih baik sesuai harapan dan cita-cita. Pemberdayaan masyarakat di Kampung Sejahtera diperlukan untuk membangun *smart city* yang dilakukan dengan berbagai cara yaitu: kegiatan ekonomi, kegiatan ketahanan pangan, pengorganisasian masyarakat, dan edukasi kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Implementasi, Masyarakat Nelayan, *Smart city*, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam dan budaya (*ecocultura*) berlimpah yang tetap masih menjadi fokus utama pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata penting untuk mendapat perhatian. Pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah seperti lanskap alam, pertanian, kehutanan, maupun peternakan yang banyak terdapat di Indonesia. Konsep *smart city*, adalah kota dengan tingkat efisiensi tinggi. *Smart city* yaitu *smart living environment*, yang mencakup sarana dan prasarana, ekonomi, mobilitas, masyarakat, dan hal lainnya yang menyangkut peningkatan kualitas pelayanan publik, tapi tidak boleh terlupakan bahwa perkembangannya harus sesuai dengan kebutuhan kota. *Smart city* adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

Tujuan *Strategi Implementasi Smart city* adalah untuk dapat membentuk dan menerapkan suatu kota yang aman, nyaman, terkendali dan mempermudah akses bagi warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian, sosial dan teknologi. Tujuan dari strategi implementasi *Smart city* adalah untuk menunjang kota di dalam dimensi sosial (keamanan), ekonomi (daya saing), teknologi dan lingkungan

(kenyamanan). Secara umum berdasarkan *United Nation*, dapat dikatakan bahwa tujuan *Smart city* adalah untuk membentuk kota yang *Sustainable (ekonomi, sosial, lingkungan)*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Propinsi Bengkulu tahun 2006, pariwisata menjadi sektor urutan pertama, karena dinilai sebagai sektor strategis dan dianggap mampu untuk membangun kemandirian daerah sebagai pendorong pertumbuhan sektor-sektor lain. Pola dasar pembangunan Kota Bengkulu menggariskan bahwa pembangunan kepariwisataan diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah permukiman kampung nelayan. Pemerintah daerah telah menetapkan program-program pembangunan di kawasan pesisir dengan menempuh kebijakan mengenai pengembangan wilayah melalui pendekatan penataan ruang. Salah satu obyek wisata di Kampung Nelayan, di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu tahun 2014, dari 10 ribu nelayan setengahnya masih tergolong miskin. Menindaklanjuti itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah menetapkan tujuh lokasi pembangunan dan pengembangan Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera (KKNS) yang tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Bengkulu

Penerapan *smart city* atau kota cerdas di Indonesia cukup sulit karena kultur budaya kota-kota di Indonesia berbeda dengan kota-kota lain. Tantangan yang besar untuk menciptakan kota cerdas yang mesti dihadapi, salah satunya adalah mengubah perilaku masyarakat. Permasalahan lain berupa pembiayaan, karena pelaksanaan *Smart city* berimplikasi terhadap pengeluaran dana yang besar, maka cenderung hanya kota-kota dengan tingkat pendapatan tinggi yang dapat mewujudkan cepat mewujudkan kota cerdas. Koordinasi dan dukungan dari stake holder pembangunan menimbulkan masalah, pemahaman akan konsep *smart city*, keterbatasan SDM dan teknologi yang dimiliki tidak dapat dipungkiri bahwa *smart city* memerlukan penerapan teknologi baru dan canggih yang mana transformasi teknologi dan informasi di Indonesia relatif masih lambat.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan *Smart city* pada masyarakat nelayan di Kampung Sejahtera, Provinsi Bengkulu. Keterlibatan masyarakat dalam hal pengembangan dan pembangunan sebagai kawasan pariwisata dilakukan berdasarkan inisiatif dari pemerintah setempat. Masyarakat kurang dilibatkan dalam pengembangan kampung sebagai kawasan pariwisata, sehingga kurang memberikan kontribusi bagi pengembangan wilayah dan masyarakat kampung nelayan pada khususnya dimana potensi objek wisata tersebut berada. Kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan masih sebatas pembangunan fisik fasilitas pariwisata tanpa memperhatikan keberadaan kampung nelayan yang juga memberikan dampak potensi wisata tersebut berada. Pemerintah setempat juga belum memperhatikan

pengelolaan SDM dan kelembagaan lokal. Kualitas sumberdaya manusia juga menjadi masalah yang serius, karena dalam mendukung industri pariwisata yang melibatkan masyarakat perlu sejumlah SDM yang kompeten untuk menciptakan industry pariwisata yang maju.

Pembangunan ekonomi lokal dilakukan dengan kemampuan memaknai kearifan lokal oleh individu, masyarakat dan pemerintah yang diwujudkan dalam berpikir, gaya hidup, dan kebijakan secara berkesinambungan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dapat diharapkan untuk meningkatkan berkehidupan yang berkualitas dalam masyarakat dan Negara. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan lokal yang unik yang berasal dari budaya atau masyarakat setempat, yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pada tingkat dalam bidang pertanian, kesehatan, penyediaan makanan, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, dan beragam kegiatan dalam komunitas-komunitas (Warren, 1991 dalam Wahyu 2007).

Penyebab kurang berkembang daerah wisata kampung sejahtera di Provinsi Bengkulu yaitu kurang kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan. Masyarakat sangat tergantung dengan sumberdaya desa untuk melakukan aktifitas dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi menjadi pegangan masyarakat tersebut (Horton dan Hunt dalam Rahardjo 2004). Sedangkan Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara RI (PP 72 tahun 2005). Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam artikel ini yaitu (1) Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menciptakan *smart city* (2) Menganalisis strategi implementasi *smart city* dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif eksploratif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini lebih banyak melukiskan/memaparkan kondisi realitas di lokasi studi yang diamati sesuai dengan fenomena yang ada, serta disusun berdasarkan kajian ilmu pengetahuan. Setelah itu dilakukan upaya mengeksplorasi potensi wisata di lokasi studi yang menjadi nilai tambah

konsep pengembangannya. Adapun data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian adalah sosial budaya masyarakat setempat, kondisi kawasan penelitian, aksesibilitas wisatawan, potensi wisata dan faktor lain terkait dengan pengembangan kawasan wisata, dan jenis data yang dibutuhkan berdasarkan sifatnya adalah data kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengidentifikasi kondisi pengembangan kampung nelayan yang memiliki potensi wilayah wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan merupakan para tokoh masyarakat dan penduduk yang memiliki pemahaman yang baik tentang pengembangan kampung sejahtera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung sejahtera dibentuk di Provinsi Bengkulu dilakukan oleh Kementerian PUPR melakukan Penataan Kawasan Permukiman Nelayan dan Tepi Air di 11 lokasi yang akan menjadi contoh pembenahan kawasan pesisir pada periode 2016-2018. Sebanyak tiga diantaranya bahkan sudah dimulai pekerjaan fisiknya sejak 2016, yakni Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Tegalsari (Kota Tegal), dan Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu). Penataan kawasan di Provinsi Bengkulu dilakukan di Kampung Sumber Jaya yang memiliki kawasan kumuh mencapai 47,42 hektar, dengan luas deliniasi mencapai 11,8 hektar. Kampung ini sebelumnya memiliki kondisi aksesibilitas atau jalan lingkungan tanpa drainase, serta turap yang rentan rusak dan belum permanen. Penataan Kampung Sumber Jaya dilakukan tahun 2016 dengan melakukan pekerjaan fisik meliputi, peningkatan jalan akses, saluran U-ditch, paving, dan tutup U-ditch.

Tujuan pelaksanaan kegiatan kampung sejahtera adalah meningkatkan peran serta masyarakat, koordinasi, kerjasama dan integrasi program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kampung sejahtera melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Permasalahan di Kampung Nelayan cukup kompleks, mulai dari lingkungan pelabuhan yang memang terkenal susah bersih, sanitasi, serta masalah terberat yaitu legalitas tanah masyarakat sekitar. Banyak rumah masyarakat di Kampung Nelayan berdiri di tanah bermasalah, karena berdiri di atas tanah milik Pelindo atau IPC. Hal ini menyulitkan pemerintah untuk membangun fasilitas umum.

Faktor-faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Menciptakan *Smart city*

Pemberdayaan adalah suatu proses belajar yang ditawarkan kepada masyarakat sasaran, agar dengan berbagai potensi/daya yang mereka miliki, mereka dapat belajar menolong dirinya sendiri, sehingga pada gilirannya akan tercapai kondisi baru lebih baik sesuai harapan dan cita-cita. Pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses control atas sumber-sumber daya yang penting (Ismawan 2001). Usaha pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari perspektif pengembangan manusia, bahwa pembangunan manusia merupakan pembentukan aspek pengakuan diri, percaya diri, kemandirian, kemampuan bekerja sama, dan toleran terhadap sesamanya, dengan menyadari potensi yang dimilikinya. Konsep pengembangan sumber daya didasarkan kepada hubungan kesetaraan antar manusia, tenaga kerja, faktor produksi seperti (tanah, material, dan mesin-mesin) (Fergus et al 1995).

Pemberdayaan dapat diartikan juga untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang terkait dengan diri mereka, untuk menggunakan daya yang ia miliki. Payne (1979) dalam Nasdian (2006). Sedangkan makna pemberdayaan yaitu membantu komunitas dengan sumberdaya, kesempatan, keahlian, dan pengetahuan agar kapasitas komunitas meningkat sehingga dapat berpartisipasi untuk menentukan warga komunitas. Pemberdayaan yang dilakukan untuk merubah perilaku masyarakat lebih baik. Menurut Susanto (2013) kunci keberhasilan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat apabila ada perubahan yang memiliki kompetensi tinggi dalam hal-hal berikut: memahami dan mampu mendalami ciri-ciri internal dan eksternal masyarakat sasaran; memahami dan mampu melakukan pendekatan pada masyarakat sasaran guna menggali kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan; mampu memahami dan menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sistem sosial masyarakat sasaran; mampu menggali nilai-nilai sosial (social values, value system) yang menjadi acuan masyarakat sasaran dalam mereka berperilaku, yang mereka anut bersama; mampu menemukan dan merumuskan: apa yang dianggap masalah utama; mampu menyadarkan masyarakat sasaran akan pentingnya dan makna belajar guna memperbaiki kompetensi mereka dan meningkatkan martabat serta kesejahteraan; mampu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan internal change agents guna merumuskan cara pemecahan masalah terbaik; mampu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan dari proses belajar di dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

Program pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memberdayakan dilakukan melalui tiga cara yaitu: menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang; memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menyediakan prasarana dan sarana baik fisik (irigasi, listrik dan jalan) maupun sosial

(sekolah dan pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah; memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah (Sugiyanto 2002). Kegiatan pemberdayaan merupakan tugas pemerintah, NGO dan swasta. Pemberdayaan masyarakat di Kampung Sejahtera diperlukan untuk membangun *smart city* yang dilakukan dengan berbagai cara yaitu: kegiatan ekonomi, kegiatan ketahanan pangan, pengorganisasian masyarakat, dan edukasi kesehatan masyarakat.

Pemerintah

Kelembagaan yang pemerintah lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Tugas umum lembaga negara antara lain : Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya; Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis; Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya; Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat; Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme; Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.

Kebijakan-kabijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya dituangkan dalam peraturan pemerintah yang terdiri dari : Sumberdaya Hutan : PP 51 tahun 1998 (Provisi sumberdaya hutan), PP24 tahun 2010 (penggunaan kawasan hutan); Sumberdaya Alam: PP No. 28 tahun 2011(pengelolaan suaka alam); Sumberdaya Air: PP 42 tahun 2008 (pengelolaan sumberdaya air); Sumberdaya Manusia: PP51 tahun 2012 (sumberdaya manusia bidang transportasi), PP103 tahun 2012 (manajemen SDM). Otonomi daerah memicu terjadinya eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan untuk meningkatkan PAD dalam pembangunan (Wardi 2005). Menurut Sugandi dan Hakiam (2009) Adapun strategi penegakan hukum pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Mengupayakan komitmen politik para pemimpin formal dan non formal pada berbagai tingkatan
2. Mengupayakan terlaksananya komitmen tersebut secara konsisten, terbuka dan operasional dilapangan
3. Menciptakan dan menumbuhkan iklim budaya malu untuk memaksakan kepentingan sendiri, tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat luas. Melibatkan peran serta aktif masyarakat.

Program pemerintah yang dilakukan di kampung Sejahtera yaitu program keluarga berencana; pemberdayaan perempuan perlindungan anak; pemberdayaan dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan ketahanan pangan; perkoperasian dan UKM;

kesehatan penataan lingkungan; keagamaan; pencegahan narkoba; dan peningkatan ekonomi kreatif keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.

CSR (*Corporate Social Responsibility*)

CSR yang dilakukan oleh swasta merupakan bentuk-bentuk program kemitraan dan bina lingkungan, yang lazim disebut sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Lembaga swasta terlibat dalam hal CSR merupakan alokasi dana khusus dari perusahaan swasta untuk membantu masyarakat di sekitar lingkungannya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Dana tersebut di luar perhitungan keuntungan perusahaan. Upaya pengembangan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu upaya pemberdayaan warga komunitas.

Peranan seorang pekerja pengembangan masyarakat menurut Nasdian (2006) dikategorikan menjadi empat peranan:

1. Fasilitator

Peranan yang dapat dilakukan yaitu: (a) Membantu memberikan inspirasi, semangat, rangsangan, inisiatif, energy dan motivasi sehingga mampu bertindak; (b) Orang yang mampu mencari jalan keluar, dan mampu bernegosiasi; (c) Mampu memberikan dukungan; (d) orang yang mampu memanfaatkan sumberdaya dan keahlian yang ada dalam suatu komunitas.

2. Pendidik

Memberikan pelatihan berdasarkan topic yang sesuai dengan kebutuhan anggota pengembangan masyarakat.

3. Utusan atau Wakil

Peranan ini berkaitan dengan interaksi pekerja pengembangan masyarakat dengan lembaga-lembaga eksternal yang member keuntungan pada komunitas melalui penggunaan media, hubungan masyarakat, dan sharing pengetahuan dan pengalaman baik secara formal dan informal.

4. Teknikal

Dalam proses pengembangan masyarakat perlu melibatkan keahlian dan teknik-teknik yang khas melakukan penguasaan beragam metode penelitian, penguasaan computer, kemampuan menyampaikan informasi data, kemampuan mengelola program, dan pengawasan keuangan.

NGOs (*Non Government Organisation*)

Kelembagaan NGOs diartikan sebagai organisasi atau kelompok yang kegiatannya antara lain dibidang pengembangan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan mutu dan taraf hidup rakyat, advokasi dan pemberdayaan masyarakat (UNDP 1993) dalam Sugiyanto (2002). Adapun Lembaga Non Pemerintah (NGOs) tujuan keberadaaan lembaga tersebut yaitu membangun keswadayaan yang tidak tergantung pada Pemerintah. NGOs meliputi organisasi Nirlaba, Lembaga Pengembangan swadaya masyarakat (LPSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kegiatannya berkaitan dengan proses dampak pembangunan, pengembangan dan perubahan sosial serta pemberdayaan rakyat (Priyono, 1995) dalam Sugiyanto (2002). Kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki pola hubungan dengan pemerintah yaitu Pola Hubungan Asosiatif: NGOs melaksanakan kebijakan pemerintah disamping tergantung pada dana pemerintah; Pola Hubungan Paralel : NGOs mempunyai posisi sejajar, apakah mau bekerja sama dengan pemerintah atau tidak, sehingga NGOs leluasa mengoreksi atau merubah kebijaksanaan; Pola Hubungan Konfliktif NGOs mengambil jarak dengan pemerintah karena membela kepentingan yang berbeda. Sehingga banyak NGOs yang bersikap membela rakyat kecil dianggap menentang pemerintah. Di Kampung Sejahtera peranan NGO belum dapat terlaksana dengan baik.

Perencanaan *smart city* adalah agenda global sebagai respon konseptual dan praktis terhadap berbagai krisis perkotaan di dunia yang semakin mengawatirkan, untuk mengembalikan hubungan antara manusia, ruang binaan dan ruang alami yang lebih harmonis, sehingga tidak saling menyakiti. *Smart city* adalah sebuah konsep koa cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Spesifikasi *Smart city* yaitu:

1. ***Smart Government (pemerintahan pintar)***: kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah Good Governance. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum.
2. ***Smart Economy (Ekonomi pintar)***: maksudnya ini adalah semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal.
3. ***Smart Mobility (mobilitas pintar)***: pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik.

4. **Smart People (orang/masyarakat pintar):** pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal manusia maupun modal sosial.
5. **Smart Living (Lingkungan pintar):** lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik.
6. **Smart Live (Hidup pintar):** berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya).

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan *smart city* yaitu pembentukan aspek pengakuan diri, percaya diri, kemandirian, kemampuan bekerja sama, dan toleran terhadap sesamanya, dengan menyadari potensi yang dimilikinya yaitu memberdayakan masyarakat.

Faktor eksternal yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yaitu tugas pemerintah, perusahaan dan NGO yang mampu melakukan kunci keberhasilan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat apabila ada perubahan yang memiliki kompetensi tinggi dalam hal-hal berikut: memahami dan mampu mendalami ciri-ciri internal dan eksternal masyarakat sasaran; memahami dan mampu melakukan pendekatan pada masyarakat sasaran guna menggali kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan; mampu memahami dan menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sistem sosial masyarakat sasaran; mampu menggali nilai-nilai sosial (*social values, value system*) yang menjadi acuan masyarakat sasaran dalam mereka berperilaku, yang mereka anut bersama; mampu menemukan dan merumuskan: apa yang dianggap masalah utama; mampu menyadarkan masyarakat sasaran akan pentingnya dan makna belajar guna memperbaiki kompetensi mereka dan meningkatkan martabat serta kesejahteraan; mampu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan *internal change agents* guna merumuskan cara pemecahan masalah terbaik; mampu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan dari proses belajar di dalam pemberdayaan masyarakat tersebut.

Kedua faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada kegiatan pemberdayaan maka akan lebih mudah terbentuknya *smart city*. *Smart city* itu adalah *smart living environment*, yang mencakup sarana dan prasarana, ekonomi, mobilitas, masyarakat, dan hal lainnya yang menyangkut peningkatan kualitas pelayanan publik, tapi tidak boleh terlupakan bahwa perkembangannya harus sesuai dengan kebutuhan kotanya.

Strategi Implementasi *Smart city* Masyarakat Nelayan di Kampung Sejahtera

Pelaksanaan program kampung sejahtera yang akan ada di setiap Kabupaten dalam wilayah Propinsi Bengkulu, merupakan sinergitas dari semua sektor agar dapat didukung

dengan Dana Desa, yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, melainkan juga dilakukan pemberdayaan, termasuk pembinaan kemasyarakatan. Strategi implementasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu:

1. Sumber daya manusia

Tugas pemerintah dan semua pihak untuk memperbaiki sumber daya manusia. Sumberdaya merupakan faktor produksi terdiri atas tanah, tenaga kerja, dan modal yg dipakai dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang jasa, serta mendistribusikannya; bahan atau keadaan yg dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya; segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, digunakan untuk mencapai hasil, misal peralatan, waktu, dan tenaga.

2. Sumber daya alam

Sumber daya alam yang telah tersedia yaitu tanah, barang tambang, Air, hutan, udara dan sinar matahari; Sumberdaya manusia : semua kegiatan manusia yang produktif dan semua potensinya untuk memberikan sumbangan yang produktif kepada masyarakat; Sumberdaya modal: peralatan dan dana yang diperlukan untuk mengelola lingkungan maupun suatu barang.

3. Sumber daya sosial

Sumber daya sosial mencakup kepemimpinan, ideologi dan kelembagaan, kehidupan masyarakat desa banyak dipengaruhi oleh keberadaan pemimpin berdasarkan kharisma yang dimiliki (Soetomo,2012). Segala bentuk pembangunan dan kemajuan kota, tentu akan dinikmati oleh warganya sendiri. Namun segala fasilitas dan teknologi yang ada di kota itu, tidak akan berfungsi dengan baik, jika wargatidak ikut terlibat dalam proses pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan. Keterlibatan warga juga memiliki peran yang membantu perwujudan *smart city* ini. Misalnya dengan aktif menyampaikan aspirasi untuk perbaikan kota, apalagi saat ini mulai berkembang aplikasi yang bisa menampung aspirasi masyarakat.

4. Perluasan skala ekonomi

Perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;

- Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Hal lain yang dilakukan yaitu mengembangkan program untuk masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

- Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
- Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Strategi Implementasi *Smart city* adalah untuk dapat membentuk dan menerapkan suatu kota yang aman, nyaman, terkendali dan mempermudah akses bagi warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian, sosial dan teknologi. Pelaksanaan program kampung sejahtera yang akan ada di setiap Kabupaten dalam wilayah Propinsi Bengkulu, merupakan sinergitas dari semua sektor agar dapat didukung dengan Dana Desa, yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, melainkan juga dilakukan pemberdayaan, termasuk pembinaan kemasyarakatan. Strategi implementasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu: strategi perbaikan sumber daya manusia dan perbaikan skala ekonomi. Pemberdayaan masyarakat di Kampung Sejahtera diperlukan untuk membangun *smart city*

yang dilakukan dengan berbagai cara yaitu: kegiatan ekonomi, kegiatan ketahanan pangan, pengorganisasian masyarakat, dan edukasi kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ismawan. (2001). *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil-Menengah*. Jakarta: Grasindo.

Nasdian F.T. (2006). *Pengembangan Masyarakat*. Bogor: IPB

Soetomo. (2012). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sugandhy, A dan Hakiam, R. (2009). *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyu, A. S. (2007). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Budaya dan Kearifan Lokal*. Lampung: Universitas Lambung Mangkurat.